
PKM PENYULUHAN PENCATATAN KEUANGAN BAGI PELAKU USAHA MIKRO KECIL PADA KELURAHAN MEKARSARI DEPOK

Dhona Shahreza¹, Lindiawatie², Anita Ria³

Universitas Indraprasta PGRI, Jakarta, Indonesia

dhona.shahreza@gmail.com¹

ABSTRAK

Pelaku usaha mikro kecil memiliki kelemahan dalam pencatatan transaksi keuangannya. Kondisi ini pula yang terjadi pada sebagian besar pelaku usaha mikro kecil di kelurahan Mekarsari, Cimanggis, Depok. Sistem administrasi dan pencatatan keuangan yang diterapkan masih sangat sederhana. Bahkan, tidak jarang masih ada pelaku usaha mikro kecil yang belum dapat memisahkan pos keuangan usaha dengan keluarga (pribadinya). Ini menyebabkan mereka tidak mengetahui secara akuntansi laba yang sudah mereka dapat. Mengetahui permasalahan itu, dibutuhkan penyuluhan bagi mereka supaya terbuka cara pandang dalam mencatat, mengadministrasikan dan membuat laporan keuangan yang benar. Tujuan abdimas ini adalah untuk memberikan penyuluhan dan simulasi cara pengelolaan administrasi keuangan secara terstruktur, terorganisir dan sistematis saat menyusun pendapatan dan pengeluaran, sehingga tidak tercampur antara keuangan pribadi dan usaha. Hasilnya adalah respon positif peserta dengan terbukanya cara pandang pelaku usaha mikro kecil tentang pembuatan laporan keuangan yang tepat. Namun, karena pengetahuan yang diperoleh hanya singkat, maka bekal yang diperoleh saat abdimas belum cukup, Oleh karenanya perlu ditindaklanjuti dengan pendampingan dan perlunya pedoman ringkas tata cara pembuatan laporan keuangan usaha mikro kecil yang bermaksud memudahkan mereka saat Menyusun laporan keuangan.

Kata Kunci: Usaha Mikro Kecil, Administrasi Keuangan, Laporan Keuangan

Received: 12 Desember 2021	Accepted: 12 Januari 2022	Published: 12 Maret 2022
--------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------

PENDAHULUAN

Pemerintah memberi perhatian yang sangat besar terhadap perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Bertahannya UMKM terhadap krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998 menjadi alasan utama mengapa pemerintah harus menaruh perhatian yang besar. Sejak krisis yang terjadi pada 1998, hampir 80 persen usaha besar mengalami kebangkrutan dan banyak melakukan PHK. UMKM sangat berperan dalam mengurangi tingkat pengangguran. Oleh karena

itu, keberhasilan UMKM mampu meningkatkan perekonomian Indonesia karena kegiatan operasional UMKM dapat mandiri dan tidak menanggung beban besar akibat krisis tersebut. Bahkan, kecilnya risiko dalam penyaluran dan pemanfaatan dana perbankan memposisikan UMKM menjadi lebih tangguh (Kurniawati, Nugroho, & Arifin, 2012).

Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memuat bahwa Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah merupakan usaha produktif yang berdiri sendiri dan dikelola perorangan atau badan usaha yang memiliki kekayaan bersih tidak lebih dari Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan hasil penjualan tidak lebih dari Rp 50.000.000.000 (lima puluh milyar Rupiah) (Machmud & Sidharta, 2013). Berdasarkan aspek komoditas yang dihasilkan, UMKM memiliki karakteristik: kualitas yang belum standar, desain dan jenis produk yang terbatas, kapasitas dan daftar harga terbatas, bahan baku kurang terstandarisasi dan kontinuitas produk tidak terjamin dan kurang sempurna (Wijaya, 2018, p. 13)

Bagi perekonomian, UMKM secara langsung mendorong pertumbuhan ekonomi untuk menengah ke bawah. Ini jelas terlihat dimana kegiatan-kegiatan ekonomi UMKM telah membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat Indonesia sehingga dapat menyerap tenaga kerja Indonesia (Notohatmodjo & Kiswara, 2014). Data Kementerian Koperasi dan UMKM pada tahun 2013 mencatat bahwa UMKM mampu menyerap 114,14 juta tenaga kerja. Selain itu, UMKM juga memberikan kontribusi terhadap PDB Nasional sebesar Rp 5.440 triliun (atas dasar harga berlaku), mampu menarik investasi Rp 1.655,2 triliun dengan total jumlah usaha sebanyak 57,8 juta unit (Wijaya, 2018, p. 3).

Namun, tantangan yang dihadapi UMKM pun tidak kalah besarnya. Terdapat 2 kendala utama yang dihadapi pelaku UMKM yaitu: faktor internal berupa permodalan, SDM, hukum dan akuntabilitas; dan faktor eksternal berupa iklim usaha, infrastruktur dan akses (Wijaya, 2018, p. 16). Kelemahan pada aspek finansial salah satunya dalam pengelolaan dana menjadi tantangan utama bagi pelaku UMKM. Padahal keberhasilan UMKM ditentukan oleh kemampuan dalam mengelola dana. Meskipun banyak faktor penyebab lainnya tetapi yang kerap muncul adalah akibat kegagalan dalam mengelola dana ini. Metode yang perlu dilakukan adalah dengan menerapkan akuntansi dengan baik. Penerapan akuntansi yang tepat dan memadai yang tercermin dalam penyajian laporan

keuangan sangat bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja, mengetahui posisi keuangan dan perhitungan pajak. Ini menjadikan UMKM dapat memperoleh berbagai informasi keuangan yang penting dalam menjalankan usahanya. Masalah keuangan terkait dengan UMKM sedikit berbeda dengan usaha berskala besar. Pada usaha berskala besar umumnya menggunakan metode akrual dalam pencatatan akuntansinya, sedangkan pada UMKM umumnya menggunakan metode berbasis kas yang mengakui pendapatan dan beban ketika kas diterima atau dikeluarkan (Kurniawati, Nugroho, & Arifin, 2012). Oleh sebab itu perlu pembenahan yang berkesinambungan agar UMKM dapat meningkatkan daya saing dan tumbuh menjadi usaha yang dapat menjanjikan di Indonesia.

Kelurahan Mekarsari merupakan wilayah yang masuk dalam kecamatan Cimanggis Depok dengan jumlah penduduk tahun 2017 sebanyak 46.267 jiwa; kedua terbesar setelah kelurahan Tugu. Perekonomian di kelurahan ini didukung dengan infrastruktur dan fasilitas dimana sarana ekonomi penduduk terdiri atas industry, pasar, kios, warung, toko dan minimarket dengan sebaran ditunjukkan tabel berikut:

Tabel 1.

Jumlah Sarana Ekonomi di Kelurahan Mekarsari tahun 2017

Sarana Ekonomi	Jumlah (unit)
Industri	3
Pasar	1
Kios	748
Warung	9
Toko	60
Minimarket	14
Total	834

Sumber: (BPS, 2018)

Berdasarkan tabel diatas, jelas bahwa pelaku usaha didominasi oleh usaha mikro, yaitu berupa warung, toko dan kios. Ini menandakan bahwa pengelolaan usaha menjadi penting agar kelangsungan usaha dapat terjaga.

Permasalahan yang dihadapi oleh pelaku UMKM di wilayah ini sebagian besar dihadapkan pada masalah keuangan. Sistem administrasi dan

PKM Penyuluhan Pencatatan Keuangan Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Pada Kelurahan Mekarsari Depok

Shahreza, Lindiawatie, & Ria (2022)

pencatatan keuangan yang diterapkan selama ini masih sangat sederhana. Bahkan, tidak jarang masih ada pelaku UMKM yang belum dapat memisahkan pos keuangan usaha dengan keluarga (pribadinya). Ini menyebabkan mereka tidak mengetahui secara akuntansi laba yang sudah mereka dapat.

Diawali dengan melihat permasalahan yang terjadi di Kelurahan Mekarsari, maka program yang akan dilakukan oleh tim abdimas Universitas Indraprasta PGRI diharapkan dapat menjawab tantangan berupa lemahnya pengelolaan administrasi dan keuangan secara terstruktur dan terorganisir serta dapat secara sistematis menyusun penghasilan dan pengeluaran, sehingga tidak tercampur antara keuangan pribadi, bersama dan organisasi yang digambarkan melalui Gambar 1 berikut ini:



Gambar 1.

Hambatan – Solusi ditawarkan PKM

Secara lebih rinci, tujuan kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah sebagai berikut: 1) Meningkatkan kualitas usaha mikro yang dijalankan oleh para pelaku usaha mikro di Kelurahan Mekarsari agar lebih akuntabel dan transparan; 2) Membantu memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang ilmu akuntansi sederhana supaya terwujudnya sistem pencatatan keuangan yang terorganisir secara rapi dan sistematis yang sesuai dengan Pedoman Umum Pencatatan Transaksi Keuangan Usaha Kecil Bukan Badan Hukum; 3) Menghasilkan luaran berupa publikasi pada jurnal nasional.

METODE

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan pada tanggal 7 Januari 2018 yang berlokasi di Aula Kantor Kelurahan Mekarsari Cimanggis Depok dengan target 10 pelaku usaha mikro kecil. Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode penyuluhan mengenai dasar-dasar akuntansi sederhana dilanjutkan dengan simulasi penyusunan Laporan Keuangan secara singkat bagi usaha mikro. Tahap-tahapnya sebagai berikut: Sesi Pemberian materi jam 09.00 – 11.30; Sesi Simulasi dan Tanya Jawab jam 13.00 – 15.00; dan Sesi Evaluasi jam 15.00 – 16.00. Dilatarbelakangi permasalahan yang dihadapi oleh pelaku UMKM di Kelurahan mekarsari maka kegiatan PKM oleh tim abdimas Unindra digambarkan melalui diagram alur berikut:



Gambar 2.
Alur Kegiatan PKM

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat dihadiri oleh pelaku usaha mikro kecil yang berada pada kelurahan Mekarsari Kecamatan Cimanggis Depok. Peserta hadir berjumlah sepuluh orang. Peserta yang hadir dianggap mewakili pelaku usaha mikro yang ada di wilayah tersebut dengan berbagai jenis bidang usaha. Pelaksanaan abdimas mengikuti alur-alur berikut: 1) Pemberian Materi, 2) Simulasi dan Tanya-jawab, 3) Evaluasi.



Gambar 3.
Pemberian Materi

Sesi Pemberian Materi

Kegiatan penyuluhan diawali dengan penyajian materi (Gambar 3). Materi yang disajikan berupa tahapan penyusunan laporan keuangan sederhana bagi usaha mikro kecil yang meliputi:

1. Memahami Asumsi Dasar Penyusunan Laporan Keuangan. Asumsi dasar yang digunakan adalah asumsi dalam menyusun laporan keuangan untuk UMKM yang dijabarkan sebagai berikut (BI, 2015):
 - a) Penyusunan laporan keuangan entitas menggunakan asumsi dasar akrual dan kelangsungan usaha. Dasar akrual adalah pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian (bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) dan dicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam Laporan Keuangan pada periode yang bersangkutan.
 - b) Pencatatan transaksi menggunakan dasar akrual kecuali arus kas. Dalam dasar akrual, pos keuangan diakui sebagai aset, kewajiban, modal dan saldo laba, penghasilan, dan beban ketika memenuhi definisi dan kriteria pengakuan untuk pos tersebut.
 - c) Dasar kelangsungan usaha mengasumsikan bahwa entitas akan melanjutkan usahanya di masa depan, yakni tidak bermaksud atau berkeinginan

melikuidasi, menutup, atau mengurangi secara material skala usahanya.

2. Menyusun Laporan keuangan dengan tahapan sebagai berikut (Putra & Kurniawati, 2012)
 - a) Penentuan periode fiskal. Periode fiskal yang digunakan adalah periode satu tahunan dimulai pada 1 Januari. Periode ini dipilih untuk mempermudah pelaku bisnis memenuhi kewajiban pajak.
 - b) Mengidentifikasi akun-akun yang terlibat dalam transaksi. Tabel berikut ini menjelaskan akun-akun yang terlibat dalam setiap transaksi:

Tabel 2.

Akun-akun dalam Transaksi

Transaksi	Kolom Debet	Kolom kredit
Pembelian bahan baku tunai	Pembelian	Kas
Pembelian Bahan baku kredit	Pembelian	Utang usaha
Retur Pembelian Tunai	Kas	Retur Pembelian
Retur Pembelian Kredit	Utang usaha	Retur pembelian
Penjualan Tunai	Kas	Penjualan
Penjualan Kredit	Piutang Usaha	Penjualan
Retur Penjualan Tunai	Retur penjualan	Kas
Retur Penjualan Kredit	Retur penjualan	Piutang Usaha
Pembayaran gaji	Beban gaji	Kas
Pembayaran telpon, air dan listrik	Beban telpon, air dan listrik	Kas
Pembayaran utang melalui kas ditangan	Utang Usaha	Kas
Pembayaran transportasi	Beban transportasi	Kas
Penyetoran modal tunai	Kas	Modal pemilik
Penyetoran tunai ke bank	Kas di bank	Kas
Pinjaman dari bank	Kas	Utang usaha
Menerima pembayaran piutang	Kas	Piutang Usaha
Membeli peralatan	Peralatan	Kas
Depresiasi Peralatan	Beban penyusutan peralatan	Akumulasi penyusutan peralatan
Sewa bangunan dibayar dimuka	Sewa bangunan dibayar dimuka	Kas
Pembayaran sewa bangunan	Beban sewa bangunan	Sewa bangunan dibayar dimuka

- c) Membuat Jurnal. Hal yang perlu diperhatikan adalah: judul; tanggal transaksi; kolom keterangan untuk

- mencatat akun dan penjelasan transaksi; kolom nominal dan kolom debit-kredit.
- d) Pemindahbukuan (posting) ke buku besar. Buku besar merupakan kumpulan akun yang memuat rician transaksi yang terdiri atas; kolom keterangan, kolom tanggal, kolom uraian, saldo awal akun, kolom debit dan kredit.
- e) Menyusun laporan keuangan. Tahap selanjutnya adalah menyusun laporan keuangan dengan rincian sebagai berikut (BI, 2015) :
- 1) Laporan Laba/Rugi dan Saldo Laba. Laporan ini mengikhtisarkan segala kinerja keuangan yang berasal dari kegiatan operasi entitas dan perubahan saldo laba selama periode tertentu. Kinerja keuangan meliputi pos penghasilan dan beban yang disajikan tidak berjenjang serta pos beban disajikan berdasarkan sifatnya. Penghasilan (income) merupakan kenaikan manfaat ekonomi selama periode pelaporan dalam bentuk arus pemasukan atau peningkatan aset, atau penurunan kewajiban yang tidak berasal dari pemilik. Penghasilan meliputi pendapatan dan keuntungan. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama periode pelaporan dalam bentuk keluar atau penurunan aset, atau terjadi akibat liabilitas yang tidak terkait dengan distribusi ke pemilik. Beban juga mencakup kerugian. Menurut (Jusup, 2011) hasil operasi diukur dengan menandingkan pendapatan yang dihasilkan dengan beban yang dikeluarkan. Apabila pendapatan lebih besar daripada beban maka entitas dinyatakan mendapatkan laba. Sebaliknya, apabila beban lebih besar daripada pendapatan maka entitas dinyatakan rugi.
 - 2) Laporan Neraca. Neraca merupakan laporan yang berisi posisi aset, liabilitas dan ekuitas pada tanggal tertentu. Aset merupakan segala

sumber daya yang dimiliki entitas untuk digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Contoh aset adalah kas dan setara kas, piutang usaha, aset tetap dan lainnya. Liabilitas merupakan kewajiban yang timbul akibat transaksi masa lalu yang mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi. Contoh liabilitas adalah utang usaha, utang bank, utang gaji. Ekuitas dan saldo laba (rugi) adalah hak residual atas aset entitas setelah dikurangi semua kewajiban. Termasuk dalam pos ini adalah setoran modal dan saldo laba.

- 3) Laporan Arus Kas. Laporan ini menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas entitas, yang meliputi penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas selama periode tertentu. Arus kas meliputi kas tunai, tabungan, dan giro. Arus kas tidak diklasifikasikan menjadi arus kas operasi, investasi dan pendanaan.
- 4) Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi informasi tambahan yang menjelaskan transaksi penting dan material yang bermanfaat dan relevan bagi pengguna laporan keuangan.

Sesi Simulasi dan Tanya-jawab

Kegiatan abdimas dilakukan dengan dua arah dimana setelah penyajian materi oleh tim abdimas Universitas Indraprasta PGRI setiap peserta dapat berperan aktif dalam berdiskusi mengutarakan permasalahan yang dihadapi. Setelah penyajian materi, tim memberikan kesempatan bagi peserta untuk mengutarakan permasalahan seputar pencatatan dan pengadministrasian keuangan usaha mereka selama ini. Namun, karena peserta belum memiliki dasar pengetahuan tentang penyusunan laporan keuangan dan juga belum pernah menerapkan sistem akuntansi bagi UMKM secara tepat maka tim menyajikan simulasi cara penyusunan laporan keuangan berupa contoh-

contoh bentuk laporan keuangan neraca, laba rugi dan arus kas kepada peserta (Gambar 4).



Gambar 4.

Simulasi dan Tanya-jawab

Sesi Evaluasi

Secara keseluruhan kegiatan pengabdian kepada masyarakat bagi pelaku usaha mikro di Kelurahan Mekarsari berjalan dengan lancar. Setiap peserta memberikan respon yang positif selama acara berlangsung. Namun, penyajian materi dan simulasi yang disampaikan hanya bisa memberikan gambaran secara singkat tentang penyusunan laporan keuangan yang benar dan seharusnya untuk pencatatan transaksi-transaksi usaha mereka. Minimnya pengetahuan dasar-dasar penyusunan laporan keuangan bagi pelaku usaha mikro membuat sistem administrasi keuangan yang diterapkan selama ini bersifat seadanya.

Temuan pada saat pelaksanaan adalah sebagian besar peserta belum pernah menerapkan sistem akuntansi bagi UMKM secara tepat. Sebagian besar peserta belum memiliki pengetahuan yang cukup tentang penyusunan laporan keuangan bagi UMKM. Oleh karenanya penyajian materi dan simulasi yang dicontohkan tidaklah cukup hanya dalam sehari. Untuk membantu peserta memahami penyusunan laporan keuangan secara tepat, maka perlu dibuat Pedoman yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan bagi pelaku usaha mikro yang berisikan tentang Pedoman Umum Pencatatan Transaksi Keuangan Usaha Kecil Bukan Badan Hukum.

PENUTUP

Untuk meningkatkan skala usahanya, maka pelaku usaha mikro kecil perlu memiliki bekal pengetahuan yang cukup baik tentang penyusunan laporan keuangan yang tepat. Kegiatan abdimas ini hanya bersifat pengantar yang bermaksud membuka cara pandang mereka tentang perlunya pencatatan, pengadministrasian dan penyusunan laporan keuangan yang baik dan benar. Penyampaian materi dan simulasi direspon dengan positif oleh pelaku usaha mikro kecil. Akan tetapi karena penyuluhan tersebut hanya singkat dan bersifat membuka cara pandang mereka, maka kegiatan abdimas ini perlu dilanjutkan dengan pendampingan pembuatan secara langsung laporan keuangan berdasarkan bidang usaha masing-masing dan perlu adanya buku saku semacam buku pedoman secara sederhana tentang cara pencatatan transaksi keuangan khusus usaha mikro kecil.

DAFTAR PUSTAKA

- BI. (2015). *Pedoman Umum Pencatatan Transaksi Keuangan Usaha Kecil Badan Usaha Bukan Badan Umum*. Jakarta: Bank Indonesia.
- BPS. (2018). *Kecamatan Cimanggis dalam Angka Tahun 2018*. Depok: BPS Kota Depok.
- Jusup, A. H. (2011). *Dasar - Dasar Akuntansi*. Yogyakarta: Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
- Kurniawati, E. P., Nugroho, P. I., & Arifin, C. (2012). Penerapan Akuntansi pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *JMK, Vol. 10*(No. 2). Retrieved September 28, 2017, from jurnal.darmajaya.ac.id/index.php/jmk/article/view/332
- Machmud, S., & Sidharta, I. (2013). Model Kajian Pendekatan Manajemen Strategik dalam Peningkatan Sektor UMKM di Kota Bandung. *Jurnal Computech & Bisnis, Vol. 7*(No. 1 Juni 2013), 56-66. Retrieved September 28, 2017, from jurnal.stmik-

**PKM Penyuluhan Pencatatan Keuangan Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Pada
Kelurahan Mekarsari Depok**

Shahreza, Lindiawatie, & Ria (2022)

mi.ac.id/index.php/jcb/article/view/101/10
6

Notohatmodjo, T. S., & Kiswara, E. (2014). Evaluasi terhadap Sistem Pencatatan Akuntansi pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Studi kasus di Kota Semarang). *Diponegoro Journal of Accounting*, Vol. 3(No. 2), 1-8. Retrieved September 28, 2017, from ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/6176/5962

Putra, H. A., & Kurniawati, E. P. (2012). Penyusunan Laporan Keuangan untuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Berbasis Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). *Pekan Ilmiah Dosen FEB-UKSW* (pp. 547-580). Salatiga: FEB Universitas Kristen Satya Wacana.

Wijaya, D. (2018). *Akuntansi UMKM*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.